

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat disertai pemanfaatannya yang cukup luas pada berbagai bidang kehidupan mendorong masyarakat dunia termasuk Indonesia untuk bertransformasi menuju ke era masyarakat digital agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Hal tersebut membuka kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (*e-government*) dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang satu di antaranya yaitu melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan (Romney & Steinbart, 2015). Penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dalam bidang pemerintahan akan menambah nilai suatu

organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta menyediakan pengendalian internal yang memadai dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, pelaksanaan proses transformasi menuju *e-government* di bidang keuangan negara oleh pemerintah Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan reformasi manajemen keuangan pemerintah (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Perkembangan reformasi manajemen keuangan pemerintah di Indonesia diawali dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menindaklanjuti amanat dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka dibentuklah *Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP)*. GFMRAP meliputi 4 bidang besar, yaitu manajemen keuangan publik, administrasi pendapatan, tata kelola dan akuntabilitas, dan tata kelola proyek dan implementasi.

Pelaksanaan manajemen keuangan publik sebagai salah satu bagian dari GFMRAP ditandai dengan dilakukannya penguatan kapasitas kebijakan, penguatan dan penyempurnaan tata kelola yang baik atas perencanaan dan pengembangan anggaran, dan modernisasi anggaran dan perbendaharaan. Dari ketiga hal tersebut, perubahan terbesar adalah dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara yang diwujudkan dalam bentuk implementasi Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN diterapkan pada *level* Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kuasa BUN yang mengintegrasikan seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara serta sekaligus berperan sebagai pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual untuk keuangan pemerintah.

Terdapat tiga pilar penopang dalam pengembangan SPAN, yaitu penyempurnaan proses bisnis, penyempurnaan sistem teknologi informasi, dan tata kelola perubahan. Dalam penyempurnaan proses bisnis, kemudian ditemukan adanya kebutuhan akan penyesuaian pada sistem informasi yang digunakan oleh K/L dan BUN. Pada BUN, kebutuhan akan sistem informasi sudah terpenuhi oleh SPAN, tetapi tidak demikian dengan K/L yang masih menggunakan aplikasi *existing* yang bersifat *stand-alone* dan SPAN tidak memungkinkan untuk diterapkan pada K/L sehingga dibentuklah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan SPAN pada setiap tahapan prosesnya.

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021). SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker dan mempunyai fungsi utama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SAKTI terdiri dari 9 modul keuangan, yaitu Modul Administrasi, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan melaksanakan dua fungsi seperti halnya Kementerian Keuangan, yaitu sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Kuasa BUN. Adanya dua fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN mengakibatkan harus adanya pemisahan tugas dan fungsi berupa pembagian dalam melaksanakan fungsi sebagai Satker dan Kuasa BUN untuk menyediakan pengendalian internal yang memadai. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPPN menggunakan dua sistem aplikasi yaitu SAKTI pada *level* Satker dan SPAN pada *level* BUN.

Penggunaan SAKTI dan SPAN serta adanya dua fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN mengharuskan entitas untuk membuat dua laporan keuangan di akhir setiap periode sebagai bentuk pertanggungjawaban, yaitu laporan keuangan Satker dan laporan keuangan BUN. KPPN menghasilkan laporan keuangan Satker melalui sistem aplikasi SAKTI dan laporan keuangan BUN melalui sistem aplikasi SPAN. Penyusunan laporan keuangan tersebut memanfaatkan penggunaan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada masing-masing sistem aplikasi SAKTI dan SPAN.

Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) merupakan modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2021). Modul GLP terhubung dengan modul lainnya dalam SAKTI dan SPAN serta berperan membentuk jurnal di setiap transaksi yang dihasilkan oleh modul lain. Selanjutnya Modul GLP akan mem-*posting* jurnal tersebut dan menghasilkan

Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Mengingat pentingnya peran Modul GLP dalam penyusunan Laporan keuangan serta adanya dua fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN yaitu sebagai Satker dan Kuasa BUN, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Sistem Aplikasi SAKTI dan SPAN dalam Penyusunan Laporan Keuangan di KPPN Pontianak”. Hal ini dikarenakan penulis ingin membandingkan kesesuaian antara peraturan, ketentuan, dan referensi akademik yang penulis dapatkan saat perkuliahan dengan apa yang dilakukan oleh objek penelitian dalam hal proses penyusunan laporan keuangan pada SAKTI dan SPAN serta pembagian fungsi yang mengoperasikan SAKTI dan SPAN di KPPN.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak?
2. Bagaimana proses bisnis Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak?
3. Bagaimana pembagian *role user* dalam mengoperasikan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN di KPPN Pontianak?
4. Apa kendala yang dihadapi KPPN Pontianak dalam penyusunan laporan keuangan melalui sistem aplikasi SAKTI dan SPAN?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meninjau penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan dari meng-*input* data hingga menghasilkan *output* berupa laporan keuangan di KPPN Pontianak.
2. Untuk mengetahui proses bisnis Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak.
3. Untuk mengetahui seperti apa pembagian *role user* di KPPN Pontianak dalam mengoperasikan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KPPN Pontianak dalam penyusunan laporan keuangan melalui sistem aplikasi SAKTI dan SPAN.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penyusunan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dalam sistem aplikasi SAKTI dan SPAN di KPPN Pontianak. Pembahasan ini menekankan pada bagaimana penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN, proses bisnis Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP), pembagian *role user* sebagai salah satu bentuk pengendalian, serta kendala yang dihadapi KPPN Pontianak dalam penyusunan laporan keuangan dari meng-*input* data hingga menghasilkan *output* berupa laporan keuangan

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak yang membutuhkan, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama dalam proses bisnis Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) di KPPN Pontianak dalam penyusunan laporan keuangan dari sistem aplikasi SAKTI dan SPAN, serta diharapkan juga dapat menjadi sarana bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah di peroleh pada bangku perkuliahan terkait Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dalam sistem aplikasi SAKTI dan SPAN serta penerapannya dalam penyusunan laporan keuangan Satker dan BUN.

b. Bagi KPPN Pontianak

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada KPPN Pontianak dalam menilai apakah proses bisnis yang telah dijalankan pada Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dalam sistem aplikasi SAKTI dan SPAN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I memuat gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II memuat pemaparan teori, ketentuan, dan/atau penelitian sebelumnya yang akan menjadi landasan dalam melakukan tinjauan dan menyusun pembahasan atas penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak. Landasan teori tersebut antara lain mengenai penjelasan SIA dan SIAP, penjelasan tentang reformasi manajemen keuangan pemerintah, penjelasan tentang SAKTI, penjelasan tentang SPAN, penjelasan tentang user SAKTI dan SPAN, penjelasan tentang KPPN sebagai Satker dan Kuasa BUN, penjelasan tentang pembagian *role user* SAKTI dan SPAN di KPPN, dan penjelasan tentang Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III memuat metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan hasil pembahasan atas topik yang diambil. Metode pengumpulan data pada dasarnya mengenai metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Gambaran umum objek penelitian merupakan uraian dari objek yang diteliti berupa profil dan sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi per bagian struktur. Hasil pembahasan merupakan jawaban atas rumusan masalah pada BAB I yang berupa hasil penelitian atas data yang diperoleh dari objek penelitian dengan didasarkan pada

landasan teori mengenai penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN, proses bisnis Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP), pembagian *role user* SAKTI dan SPAN, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV memuat penjabaran kesimpulan yang diperoleh dari hasil tinjauan di lapangan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya atas penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak.